

BAB I

Memahami Politik Masyarakat Sipil Islam: Catatan Pendahuluan

Endang Turmudi

Hadirnya kalangan masyarakat sipil Islam dalam politik Indonesia akhir-akhir ini, seperti terlihat melalui hadirnya gerakan 212 dalam pilgub DKI 2017 dan pilpres 2019, disebabkan oleh adanya dua hal, yaitu tersedianya lahan untuk aktif dalam politik yang disediakan oleh demokrasi dan pada sisi lain, menguatnya sikap beragama masyarakat Islam Indonesia. Demokratisasi yang diluncurkan dengan kuat setelah reformasi politik pada 1999 menyusul tumbanganya Orde Baru yang otoriter telah mengubah secara struktural panggung politik Indonesia. Perubahan ini telah memberi peluang bagi para penganut kuat Islam, yang biasa disebut santri, untuk ikut ambil bagian dalam mengembangkan dan membangun politik Indonesia. Dengan menguatnya sikap atau spirit beragamanya, mereka melakukan perjuangan politiknya dengan berdasar pada perspektif agama

E. Turmudi

Badan Riset dan Inovasi Nasional, *e-mail*: endangturmudi@yahoo.com

© 2024 Editor & Penulis

Turmudi, E. (2024). Memahami politik masyarakat sipil Islam: Catatan pendahuluan. Dalam E. Turmudi (Ed.), *Masyarakat Sipil Islam dalam Kehidupan Demokrasi Indonesia* (1–43). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.753.c928

E-ISBN: 978-623-8372-64-5

yang mereka anut, di antaranya seperti terlihat dari beberapa kali dilakukannya ijtima' ulama (musyawarah ulama) dalam kasus pilpres 2019. Fenomena "politik agama" ini memang bukan kejadian baru mengingat dalam politik Indonesia sendiri pengaruh Islam cukup kuat dan sejak lama para ulama terlibat dalam politik (Fealy, 2003; Fogg, 2012). Partai-partai politik pada masa demokrasi liberal telah memperjuangkan politik Islam ini, dan posisi mereka cukup kuat atau berimbang dengan partai nasional sekuler. Pada pemilu 1955, partai politik Islam meraih sekitar 43% suara nasional. Meskipun demikian, pengusuran partai-partai Islam oleh Orde Baru telah menyebabkan redupnya semangat politik umat, yang bahkan kemudian seolah buyar dengan diberlakukannya asas tunggal, yang dengan itu partai politik Islam disingkirkan (Ismail, 1995).

Dengan dibukanya politik melalui demokratisasi menyusul tumbangannya Orde Baru, semangat "politik Islam" tadi seolah bangkit kembali, setidaknya dengan hadirnya berbagai parpol bersimbol Islam. Kembalinya politik Islam ini sejalan dengan kembalinya spirit beragama di kalangan umat Islam, yang sering dinamai oleh para sarjana sebagai "kebangkitan Islam". Meskipun demikian, kehadiran partai-partai ini tidak didukung oleh masyarakat Islam bawah, seperti terlihat dari terus menurunnya perolehan suara untuk partai-partai Islam tersebut (Turmudi, 2016). PKB yang merupakan partai kalangan Nahdlatul Ulama (NU), misalnya, hanya memperoleh sekitar 5,9% pada pemilu 2009, padahal pada pemilu 1999 partai ini meraih 13% (perbandingan perolehan partai NU pada pemilu 1955 dan 1971 yang mencapai 18% lebih). Oleh sebab itu, partai-partai Islam ini mengubah diri menjadi partai terbuka untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat yang lebih luas karena posisinya sebagai partai yang dianggap eksklusif menyebabkannya hanya didukung oleh kalangan Islam tradisional. Kecenderungan ini memperlihatkan bahwa menguatnya semangat berislam tidak lagi membangkitkan semangat berpolitik Islam (Turmudi, 2016).

Di luar kasus menurunnya dukungan masyarakat terhadap politik Islam tersebut, kasus lain dalam politik memperlihatkan tetap kuatnya

semangat berislam, bahkan dalam mendukung politik Islam sendiri. Kasus dugaan “penodaan agama” oleh Basuki Cahaya Purnama atau Ahok dalam pilgub DKI, misalnya, ternyata kemudian bisa menyatukan suara umat Islam sehingga mengalahkan calon yang dianggap tidak memperjuangkan politik umat Islam atau bahkan melecehkan Islam itu sendiri. Hal yang sama terjadi dalam pilpres 2019, di mana kedua kubu yang bersaing merasa perlu menampilkan simbol-simbol Islam, seperti keulamaan yang melekat pada calon, untuk mendapatkan dukungan umat Islam. Faktor Ma’ruf Amien, yang merupakan tokoh Islam dan ulama, dianggap cukup penting dalam kemenangan Joko Widodo yang menjadikan atau mendudukannya sebagai calon wakilnya dalam pilpres tersebut. Dua kasus ini memperlihatkan menguatnya dukungan politik dari umat Islam di tengah melemahnya partai politik Islam.

Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa dalam hal yang berkaitan dengan partai politik Islam, simbol-simbol keislaman saja ternyata tidak cukup menarik umat Islam untuk memberikan dukungan politik. Hal ini memperlihatkan bahwa penguatan keberislaman dalam masyarakat (sipil) tidak serta merta akan memperkuat politik Islam pada umumnya. Lalu, apa yang menyebabkan dukungan umat Islam begitu kuat terhadap calon tertentu dalam kasus pilgub DKI tersebut? Penulis dapat berspekulasi bahwa dukungan politik yang benar-benar untuk politik Islam, dengan cara memilih calon gubernur beragama Islam, pada awalnya hanya akan diberikan oleh sebagian kecil umat Islam taat di DKI ini. Faktor dugaan “penodaan Islam”, yang menjadi isu kuat politik dalam pilgub tersebut telah menyebabkan mereka yang sebelumnya akan mendukung petahana mengubah dukungannya dengan memberikannya kepada calon yang dianggap memperjuangkan umat Islam. Perubahan ini dapat terjadi karena semangat berislam telah membuat umat Islam tidak simpatik dengan yang dianggap “pelaku penodaan terhadap Islam” atau karena mereka tergiring opini umum umat Islam.

Kasus-kasus tersebut adalah fenomena penguatan keberagamaan (religiositas) dalam masyarakat yang disebut Habermas (2008) sebagai

pascasekulerisme (post-secularism). Dalam hal ini, masyarakat Islam—meskipun semangat beragama mereka meningkat—tidak dengan serta merta mendukung politik Islam yang diperjuangkan para politisi. Hal ini berarti bahwa semangat berislam tidak selalu beriringan atau mendorong umat Islam untuk mendukung politik Islam (Turmudi, 2016). Pascaislamisme (Bayat, 2013) adalah kecenderungan yang memperlihatkan bahwa semangat berislam dari masyarakat modern sekarang diarahkan untuk membangun *civilitas* umat dalam berbagai bidang kehidupan dan tidak diarahkan untuk membangun atau mendudukkan Islam dalam kekuasaan atau politik kenegaraan. Penguatan keberislaman masyarakat ini diarahkan untuk dapat lebih berkiprah bagi pengembangan masyarakat daripada memperkuat politik Islam. Hal ini berarti bahwa penguatan atau pembinaan keberislaman, melalui berbagai media pendidikan, lebih ditujukan bagi pemberdayaan masyarakat sipil Islam dan tidak diarahkan untuk memperkuat politik Islam.

Pertanyaan berikutnya adalah mengapa sebagian umat Islam, seperti yang tergabung dalam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), seperti ngotot untuk berjuang bagi Islam dan bahkan dengan tujuan mengubah sistem kenegaraan sendiri atau setidaknya mendudukkan Islam sebagai dasar negara. Tuduhan yang sama biasanya dialamatkan kepada Front Pembela Islam (FPI) yang sekarang secara formal sudah dibubarkan. Tim peneliti mencoba menggali lebih dalam apa sesungguhnya yang menggerakkan mereka untuk begitu kuat ber-*Islam oriented*. Meskipun terlihat seperti berjuang dengan cara yang sama, organisasi sipil Islam ini mempunyai karakter perjuangan yang berbeda, dan bahkan jalan yang ditempuh dalam berjuang juga berbeda. FPI, dilihat dalam kajian ini, bergerak secara normal sebagai organisasi masyarakat sipil Islam, sementara HTI lebih terlihat eksklusif, bukan saja mempunyai agenda dengan tujuan pembentukan khilafah Islam, tetapi juga tidak ikut dalam kehidupan politik demokrasi di Indonesia. FPI, seperti organisasi masyarakat sipil Islam lainnya, seperti NU dan Muhammadiyah ikut berpartisipasi dalam politik, seperti dalam pemilu, sementara HTI diduga tidak ikut ambil

bagian dalam setiap pemilu karena menganggap demokrasi itu sendiri bukan sistem ideal yang mereka harapkan. Apa yang dilakukan FPI, seperti terlihat di beberapa lokasi yang diteliti lebih merupakan variasi lain dalam berpolitik mereka dengan menikmati demokratisasi yang berjalan di Indonesia dan menggunakannya sebagai media berpolitik mereka dengan tujuan memperbaiki bangsa dan terutama umat Islam Indonesia.

Apa yang dilakukan HTI memang berbeda dengan mayoritas organisasi masyarakat sipil lainnya yang berasal dari kalangan Islam. Mereka yang disebut belakangan ini berhasil bernegosiasi dengan negara dan menyesuaikan diri dengan politik yang berkembang dalam percaturan atau kompetisi mereka dengan kalangan nasionalis sekuler. Partai politik Islam memang gagal mengegolkan harapan mereka untuk menjadikan syariat sebagai dasar hukum negara, bukan hanya karena secara politik mereka kurang kuat, tetapi juga karena pada dasarnya masyarakat sipil yang mendukungnya mempunyai pandangan dan sikap politik tertentu meskipun ini bukan berarti mereka luntur dari sisi semangat berislamnya. Seperti terlihat sampai sekarang, masyarakat sipil yang beragama Islam, seperti terlihat dari Muhammadiyah dan NU, lebih menerima NKRI yang dari sisi ideologi dapat disebut sekuler dengan menggunakan Pancasila sebagai dasarnya, daripada memaksakan menempatkan Islam sebagai dasar negara.

Lepas dari perbedaan yang muncul, para pengusung politik Islam tetap bersemangat untuk maju memperjuangkan yang mereka idealkan. Jadi, dengan melihat perjalanan para pengusung politik Islam, tidak salah kalau beberapa ilmuwan, seperti Adeney-Risakotta (2018) menyatakan bahwa pusat gravitasi Islam sekarang ini bukanlah di Timur Tengah, tetapi di Asia yang dalam hal ini juga dapat dilihat di Indonesia. Dengan perkembangan seperti itu, yang ditandai oleh pertentangan ideologi antara kalangan nasionalisme sekuler dan nasionalisme religius, Bouchier (2019: 713) menyimpulkan bahwa *“while far from hegemonic, religious nationalism has come increasingly to occupy the centre ground in Indonesian politics”*. Apa yang penting

dicatat adalah bahwa kecenderungan ini justru muncul di tengah melemahnya partai politik Islam (Turmudi, 2016). Oleh karena itu, bisa diduga bahwa penggerak nasionalisme religius ini adalah masyarakat sipil Islam yang tergabung dalam berbagai organisasi Islam.

Hadirnya kembali semangat politik Islam memang bukan hal aneh, bukan saja karena politik Islam pernah menjadi media perjuangan umat Islam, seperti terlihat dari hadirnya partai Islam Masyumi dan NU, melainkan juga karena umat Islam mempunyai etika yang harus diterapkan dalam semua bidang kehidupan. Hefner (2020) menegaskan tentang '*civil Islam*', yakni etika yang berasal dari ajaran Islam yang mendorong umat Islam untuk berdemokrasi dalam berpolitik. Akan tetapi, seperti terlihat dalam sejarah politik Indonesia, perjuangan politik Islam juga berfluktuasi dan umat Islam harus menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah yang hanya mengizinkan politik sekuler, seperti terlihat dari pemberedelan partai Islam oleh Orde Baru. Intinya, umat Islam menerima saja perubahan yang terjadi demi membaiknya politik dan demokratisasi di Indonesia pada umumnya.

Oleh karena itulah, seperti dinyatakan oleh Liddle dan Muzani (2013), kalangan Islam arus utama, seperti NU dan Muhammadiyah mendukung transisi demokrasi hingga tercapai demokrasi yang terkonsolidasikan. Perbedaan di antara partai Islam yang didukung oleh umat Islam pada umumnya terjadi dalam hal perjuangan politik Islam. Meskipun demikian, mereka seragam dalam menyetujui dan mendukung gagasan dan praktik demokrasi dalam mengelola kehidupan bernegara dan bermasyarakat, sekaligus mereka juga menekankan bahwa Islam bukanlah ancaman terhadap demokrasi yang dibangun. Lebih jauh, mereka menekankan bahwa Islam dan demokrasi juga harus berjalan seiring dan tidak berjalan sendiri-sendiri seperti di negara barat, yang memisahkan agama di ruang privat dengan demokrasi di ruang publik.

A. Politik dan Agama dalam Diskursus Literatur

Biasanya, orang mengasumsikan bahwa demokrasi yang baik dan berkembang akan melahirkan masyarakat sipil atau berbagai masyarakat sipil yang perannya dalam politik akan terus menguat, mengingat demokrasi memberikan ruang yang besar dan bebas kepada masyarakat sipil, baik untuk mengembangkan dirinya maupun untuk ikut aktif dalam berpolitik, sebagai medium untuk mencapai cita-cita dan kepentingan politik mereka. Demokrasi adalah konsepsi tentang sistem yang kemudian dipegang oleh aparatur politik negara untuk mengembangkan negara dengan cara memberikan ruang partisipasi kepada rakyat atau masyarakat sipil untuk turut ambil bagian dalam menentukan baik nasib negara sebagai rumah besar di mana masyarakat bernaung maupun untuk menentukan nasib rakyat sendiri yang dalam kasus ini sebagai masyarakat sipil di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara yang plural.

Oleh karena yang akan dilihat adalah hubungan antarmasyarakat sipil religius, yang dalam hal ini masyarakat sipil Islam, telaahan umum harus diarahkan kepada hubungan antara Islam dan demokrasi. Topik mengenai ini memang sudah lama muncul dan menjadi telaahan para sarjana, yang dalam khasanah keilmuan Barat berkaitan dengan hubungan antara gereja dan negara. Proses ini sudah lama terjadi, lebih-lebih gereja sudah lama terlibat dalam politik negara. Gereja lah yang menentukan arah negara dan ini terjadi karena perkembangan dunia kristiani diawali dengan berdirinya negara-negara Kristen. Hal yang sama juga terjadi di lingkungan Islam, di mana Islam juga berkembang melalui kehadiran negara-negara Islam. Di Indonesia terdapat negara, seperti Demak Bintoro dan Mataram yang merupakan lembaga yang mengatur kehidupan masyarakat dengan merujuk pada aturan ataupun norma yang berasal dari kitab suci Al-Qur'an.

Dalam memahami hubungan tersebut, ada baiknya melihat topik ini dengan merujuk ke berbagai literatur yang terkait dengan hubungan agama dan demokrasi atau politik. Hubungan agama dan politik itu sebenarnya setua kehadiran agama itu sendiri karena agama lahir dalam suatu masyarakat politik atau masyarakat dalam suatu

geopolitik tertentu. Penyebaran agama sendiri sangat tergantung pada kekuatan politik atau dukungan politik dari masyarakat yang hidup dalam suatu komunitas atau kerajaan atau negara dalam konsep modern. Bahkan, dalam sejarah tercatat bahwa agama itu berkembang melalui dukungan politik dari para penguasa. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika masa awal perkembangan agama itu berkaitan dengan kekuasaan atau para penguasa yang memberikan dukungan atau mengadopsi agama bersangkutan menjadi agama negara. Dengan dukungan penguasalah agama itu berkembang. Dalam bahasa Ibnu Khaldun: “*annasu ‘ala dini mulkihim*” (umat manusia itu akan tergantung pada agama rajanya).

Meskipun Islam dan agama lain berbeda dalam hal keterkaitannya dengan politik, secara umum dapat dikatakan bahwa agama itu secara sosiologis berkembang melalui kekuatan politik dan bahkan politik sendiri kemudian seolah disetir oleh agama, setelah agama tersebut diterima atau dianut oleh seluruh atau sebagian besar masyarakat. Penguasa utama, yang pada masa dulu seorang raja, atau sultan, atau amir dalam Islam, menjadi penyebar utama agama. Oleh karena itu, dia menggunakan kekuasaannya dengan memakai justifikasi agama atau diwarnai oleh agama. Para penulis buku tentang topik ini melihat kewajaran akan hadirnya agama dalam dunia politik suatu bangsa atau memengaruhi politiknya. Tocqueville (1956), yang menulis tentang demokrasi di Amerika dan juga melihat peran agama dalam politik di sana, memahami logikanya mengapa agama memengaruhi atau digunakan sebagai dasar atau norma politik mereka. Agama dilihat oleh Tocqueville, penulis muda aristokrat saat itu, sebagai sumber moral yang digunakan oleh masyarakat. Tocqueville sebagai orang yang cukup taat beragama memahami sekali kenapa manusia menggunakan agama sebagai sumber moral politik. Menurutnya, agama adalah sumber moral yang menuntun manusia pada perbaikan karakternya. Artinya, sempurnanya manusia itu dituntun oleh moralitas yang berasal dari agama, meskipun sebenarnya tuntunan ini terbatas pada bidang spiritual. Juga, meskipun dunia politik di dunia Barat dilandasi oleh moral sekuler, perbaikan perkembangannya dalam

jangka panjang akan sangat tergantung pada perbaikan dalam bidang sipiritual tadi.

Tocqueville pada intinya melihat pentingnya agama meskipun dalam kehidupan negara demokrasi yang sekuler. Menurutnya, agama mempunyai norma-norma dasar yang tidak berubah. Jika terjadi perubahan, hal itu sebenarnya terjadi pada manusia yang memeluk agama tersebut. Di sinilah Tocqueville melihat pentingnya agama untuk hadir dalam masyarakat demokrasi sekuler yang perilaku manusianya dapat menabrak nilai-nilai moral. Meskipun demikian, Tocqueville tidak setuju bahwa agama ikut nongkrong dalam kekuasaan, mengingat tidak semua norma dalam kehidupan modern dapat disediakan oleh agama. Oleh karena itu, meskipun Tocqueville masih mempertahankan kehadiran agama dalam masyarakat atau demokrasi modern, dia tetap berpendapat tentang pentingnya memisahkan gereja (agama) dari negara, yang artinya kekuasaan negara tidak harus dipengaruhi oleh agama, atau undang-undang negara tidak seharusnya berasal dari agama.

Oleh karena itu, sudah sejak lama para cendekiawan mengakui adanya keterkaitan agama dengan politik, bahkan dikatakan bahwa agama turut berpengaruh terhadap politik suatu masyarakat atau negara. Akan tetapi, perkembangan masyarakat menjadi modern telah menyebabkan pengaruh agama dalam kehidupan masyarakat, apalagi pengaruhnya terhadap politik, seperti mengendur karena sekularisasi telah menyebabkan agama dipinggirkan dan masyarakat tidak lagi memakai norma atau ide yang berasal dari agama. Masyarakat modern yang sekuler lebih banyak memakai ide-ide rasional yang mereka buat sendiri daripada norma atau ajaran agama, dengan berdasar dari perhitungan atau penilaian nyata mereka terkait dengan persoalan-persoalan kehidupan yang mereka alami.

Proses sekularisasi dalam kehidupan pada umumnya, termasuk dalam konteks tidak terpakainya agama dalam politik, sebenarnya suatu proses yang biasa saja, yakni hal ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat sendiri. Baik para sosiolog, seperti Berger (1999), bahkan Robertson dan Chirico (1985) serta para *theorist* politik,

seperti Almond (1988) melihat tidak berpengaruhnya agama dalam kehidupan manusia modern adalah karena perkembangan masyarakat menjadi modern mengharuskan terjadinya perubahan-perubahan. Modernisasi yang membuat perubahan ini memang membawa di dalamnya nilai-nilai sekuler dengan berpangkal pada rasionalitas baik dalam cara berpikir, bertindak, dan berkeputusan. Dalam dunia politik perubahan yang membawa nilai sekuler ini, di antaranya dan yang paling nyata adalah meminggirkan agama karena politik liberal yang dibawa oleh demokrasi memerlukan nilai-nilai sekuler dan pikiran-pikiran rasional, bukan nilai agama yang dianggapnya tidak rasional.

Tentang bagaimana agama dan politik di Indonesia berkaitan, Geertz (1965) adalah antropolog Amerika yang telah menggambarkan bagaimana agama atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat, termasuk di dalamnya norma agama, sangat berpengaruh terhadap tingkah laku atau bahkan perangai masyarakat Jawa. Dia menggambarkan bagaimana para penganut Islam merujuk politik mereka kepada ajaran atau petunjuk yang berasal dari agama mereka. Apa yang sangat jelas, misalnya, adalah gambaran Feith & Castle (1970) tentang pengaruh norma atau nilai pada umumnya, lagi-lagi termasuk nilai atau norma dan ajaran agama, terhadap berbagai politik yang ada di Indonesia, seperti tercermin dalam politik aliran. Para antropolog menyebut faktor itu sebagai “jaring laba-laba” di mana manusia, seperti laba-laba, akan bergerak dan bertingkah laku di seputar yang digariskan oleh norma atau norma agama yang terbentang, seperti jaring laba-laba tersebut.

Sebagai masyarakat yang kuat beragama, masyarakat sipil Islam bisa diduga begitu kuat terpengaruh oleh ide, pikiran, ataupun gagasan yang berasal dari agama, seperti terlihat dari bagaimana mereka berjuang di masa-masa membentuk negara Indonesia dan di masa awal kemerdekaan untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara. Masyarakat sipil Islam, seperti NU dan Muhammadiyah, telah berjuang dalam kemerdekaan Indonesia melalui partai politik dengan tidak terlepas dari keterikatannya pada ajaran Islam itu sendiri, de-

ngan tujuan “*izzul Islam wa al-Muslimin*” (kejayaan Islam dan kaum muslimin). Pada saat Indonesia hendak merdeka pada Agustus 1945, seorang tokoh NU bernama Wahid Hasyim mengambil bagian dalam merumuskan Piagam Jakarta, yang salah satu tujuannya adalah untuk menyarankan bahwa kemerdekaan Indonesia harus didasarkan pada “ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi umat Islam Indonesia” (Elson, 2009; Fogg, 2012). Sebagai partai politik Islam (1952–1973), NU juga berjuang melalui parlemen dan Majelis Konstituante (dibentuk pada tahun 1956 untuk merumuskan konstitusi) untuk menempatkan syariat Islam dalam konstitusi Indonesia (Fealy, 2003).

Meskipun demikian, dalam kehidupan politik Indonesia saat ini, berbagai partai politik Islam, yang berarti juga kelompok masyarakat sipil Islam, mempunyai perspektif berbeda dalam menjalankan politik Islam mereka. Namun, perlu dicatat bahwa perjuangan politik Islam itu tidak pernah berhenti meskipun mengalami fluktuasi atau dengan perspektif yang berubah-ubah. Bourchier (2019) mencatat bahwa selama sepuluh tahun masa pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono, perjuangan politik Islam itu digelorakan oleh partai-partai politik Islam. Masa ini memperlihatkan persaingan terbuka antara para penganut politik Islam dan politik nasionalis sekuler. Apa yang menarik adalah bahwa lepas dari berhasilnya Suharto menyingkirkan politik Islam—karena berbagai alasan termasuk sikap fobianya terhadap Islam¹—kelompok masyarakat sipil Islam tetap menggaungkan politik ini setelah partai-partai politik Islam lumpuh karena kalah dalam bertarung di medan politik nasional.

Kontestasi antara para pendukung politik Islam dan kalangan sekuler terus berlangsung dan makin kentara dalam sepuluh tahun

¹ Fobia atau kecurigaan politik Islam ini, menurut Crouch, yang disebabkan Soeharto, sangat dipengaruhi oleh sinkretisme Jawa karena pendukungnya di jajaran tentara, yaitu para jenderal, adalah sinkretis yang secara tradisional menunjukkan permusuhan terhadap Islam. Lihat Crouch, H. (1980). *The new order: The prospect for political stability*. Dalam J. J. Fox, R. Garnaut, P. McCawley, & J. A. C. Mackie. (Eds.), *Indonesia: Australian perspectives* (657–667). Research School of Pacific Studies The Australian National University.

terakhir ini. Lepas dari tidak populernya partai politik Islam, seperti terlihat dari melemahnya partai-partai Islam di tengah menguatnya spirit berislam (Turmudi, 2016), dan lepas dari hadirnya gejala post-Islamisme, seperti dinyatakan oleh Bayat (2013) dalam kasus di Iran, di mana banyak masyarakat sipil di sana tidak lagi berjuang untuk politik Islam, semangat politik Islam di Indonesia masih terus hidup, untuk tidak mengatakan membara. Protes yang dilakukan oleh ‘gerakan 212’ yang kemudian menjadi gerakan politik dapat dilihat sebagai indikasi tentang bagaimana politik Islam masih hidup dalam hati para aktivis Islam. Meskipun warna dan polanya bervariasi, gerakan ini tetap hidup dan mungkin didorong oleh kuatnya upaya penyingkiran apa-apa yang berbau Islam, terutama politiknya, oleh kalangan sekuler. Sebagai catatan yang cukup penting adalah bahwa politik Islam pada 30 tahun belakangan ini adalah yang diperjuangkan oleh organisasi sipil, seperti NU dan Muhammadiyah dan ormas Islam lainnya termasuk FPI. Mereka tidak langsung berpolitik praktis, tetapi pikiran-pikiran dan langkah politiknya nyata dan diperhitungkan pemerintah. Mereka, bahkan oleh Hefner (2000; 2019) disebut sebagai kalangan yang mendinamiskan politik karena mereka dipandu oleh etika Islam yang terus mereka pegang.

Dalam konteks kontestasi, gerakan politik masyarakat sipil Islam ini mungkin reaksi yang muncul karena tekanan yang mereka dapatkan. Pemerintah sendiri yang merupakan representasi kalangan sekuler berusaha sekuat tenaga untuk meminggirkan semangat politik Islam ini sehingga terjerembap dalam tindakan-tindakan otoriter.² Setidaknya, represi itu terjadi selama hidupnya pemerintah Orde Baru, di mana saat itu organisasi sipil Islam, seperti Muhammadiyah dan NU menitikkan atau menjadikan partai politik sebagai

² Beberapa penulis menyatakan tentang kecenderungan otoriternya pemerintah dengan membuat langkah politik atau berbagai peraturan untuk mencegah berkembangnya politik Islam. Kalangan Islam sendiri merasakan tekanan ini sehingga mereka melontarkan tuduhan, misalnya, bahwa pemerintah melakukan kriminalisasi terhadap ulama. Lihat Fealy, G. (2020, 27 September). Jokowi's repressive pluralism. *East Asia Forum*. <https://www.eastasiaforum.org/2020/09/27/jokowis-repressive-pluralism/>

media perjuangan mereka. Akan tetapi, kuatnya Orde Baru, seperti kuatnya dia dalam hal tidak menyukai politik Islam telah membuat politik Islam terseret ke pinggir setelah diberlakukannya asas tunggal. Meskipun demikian, semangat politik Islam tetap hidup di kalangan organisasi sipil Islam, apalagi reformasi politik pada 1998 memberikan ruang bagi siapa dan apapun untuk berjuang lewat politik dengan simbol apapun. Lepas dari kurang lakunya politik Islam secara keseluruhan, dan mungkin hanya diikuti oleh sebagian umat Islam saja, suatu gejala yang mirip dengan yang digambarkan oleh Bayat (2013) dalam kasus di Iran, momen kebangkitan Islam yang ditandai oleh meningkatnya religiusitas masyarakat, telah memungkinkan semangat politik Islam terus hidup. Peningkatan semangat berislam di Indonesia, yang diingar bingarkan oleh segala atribut dan simbol keislaman adalah menandai apa yang oleh sebagian sosiolog, dan terutama filosof, seperti Habermas (1961) atau Berger (1999), disebut era post-sekularisme di mana manusia kembali lagi kepada agama dan mewarnai hidupnya dengan nilai-nilai agama, meskipun dalam hal berpolitik agama hanya dibawa oleh sebagian kecil saja dari mereka.

B. Gerak Masyarakat Sipil di Tiga Daerah

Masyarakat di tiga kota ini, yakni Cirebon, Bandung, dan Serang terlihat cukup islami dalam artian merupakan penganut Islam kuat, di mana mereka melaksanakan Islam secara taat. Dengan merujuk pada konsep yang dinyatakan oleh Clifford Geertz (1965) masyarakat ketiga kota ini dihuni oleh mayoritas masyarakat santri. Sebutan santri memang biasa dilakukan oleh masyarakat Islam untuk merujuk pada mereka yang melaksanakan Islam secara taat dan benar. Santri ini berbeda dengan abangan yang meskipun keduanya beragama Islam, tetapi abangan mempraktikkan Islam tidak dengan sempurna. Sebagian cendekiawan menyebut abangan itu dengan istilah nominal 'muslim'.

Beberapa organisasi masyarakat sipil Islam menjadi fokus bahasan atau telaahan dalam kajian ini. Kajian dilaksanakan di kota besar, yaitu Cirebon, Bandung, serta Serang sehingga kami dapat dengan

mudah menemukan berbagai organisasi masyarakat sipil Islam ini. Dua organisasi masyarakat Islam, yaitu NU dan Muhammadiyah jelas menjadi objek telaahan, mengingat keduanya bukan hanya mempunyai pengikut yang sangat besar, tetapi juga memengaruhi keberislaman masyarakat, termasuk bidang politiknya. Selain itu, organisasi dengan jumlah anggota menengah, seperti Persis (Persatuan Islam), kami jadikan sasaran telaahan juga mengingat organisasi ini, apalagi untuk masyarakat Bandung cukup berpengaruh sejak lama karena memang ia lahir masih di masa penjajahan Belanda. Dengan adanya perkembangan masyarakat Islam, kami juga mengkaji organisasi sipil Islam baru, seperti Front Pembela Islam (FPI), atau bahkan organisasi atau pergerakan yang dimotori kalangan Islam taat. Apa yang juga cukup penting kami lihat adalah kalangan pesantren, yang merupakan landasan di mana NU berdiri. Pesantren dilihat karena dalam banyak hal mereka mempunyai pandangan-pandangan politik yang agak berbeda dengan NU meskipun tidak signifikan. Mereka yang mengatasnamakan pesantren sebagai bagian dari kelompok masyarakat sipil Islam ini terjadi di Banten. Seperti terlihat dalam beberapa kali pertemuan antara organisasi masyarakat sipil Islam, mereka hadir dengan mengatasnamakan pesantrennya sendiri.

Semua organisasi masyarakat sipil Islam ini memang berbeda atau bervariasi dalam pemahaman keislaman mereka sehingga pandangan dan sikap politik mereka juga bervariasi. Meskipun banyak yang berpaham seperti NU, anggota Front Pembela Islam, misalnya, mempunyai sikap dan pandangan politik yang berbeda dengan anggota atau Masyarakat NU. Demikian juga dengan organisasi lainnya. Apa yang jelas adalah bahwa perubahan sosial telah membuat berbagai kalangan mengekspresikan sikap-sikap mereka secara tegas, meskipun berbeda dengan mayoritas umat Islam. FPI di Cirebon terlihat lebih keras dalam hal melaksanakan Islam, terutama dalam melaksanakan "nahi munkar", termasuk dalam melakukan tindakan politik mereka. Berbeda dengan mereka adalah Masyarakat NU yang terlihat toleran dalam perbedaan, seperti perbedaan mereka dalam mempraktikkan Islam.

Di Indonesia, pergerakan masyarakat sipil dalam konteks bagaimana mereka menjalani kehidupan dalam negara yang mengelilinginya sudah lama terjadi. Bahkan, sebelum Indonesia terbentuk dan sebelum hadirnya partai politik, kehidupan politik masyarakat bisa dikatakan diwakili oleh organisasi-organisasi Islam. Dan sebelum organisasi ini terbentuk, kehidupan politik masyarakat pada umumnya diwakili oleh gerakan-gerakan yang biasanya berbau agama. Beberapa gerakan sosial atau protes yang dilakukan kalangan tarekat atau juga gerakan 'ratu adil' yang terjadi dalam masyarakat Nusantara adalah contoh dari gerakan masyarakat sipil dalam konteks kehidupan bernegara. Dahulu, mereka bisa lebih aktif bergerak karena mereka hidup dalam kungkungan kolonialisme yang biasanya dijalankan dengan melanggar prinsip-prinsip keadilan, lebih-lebih kolonialisme ini dilakukan oleh bangsa lain yang memang mau mencari keuntungan dalam koloni yang dikelolanya.

Setelah organisasi Islam terbentuk di awal abad ke-20 bersama dengan lahirnya organisasi umum lainnya, pergerakan masyarakat sipil Islam dapat dikatakan lebih terarah dan bahkan mungkin terencana. Diawali dengan kehadiran Sarekat Dagang Islam, kelahiran organisasi Islam di samping sebagai media merespons kebijakan-kebijakan kolonial yang eksploitatif juga sebagai media untuk memperlihatkan jati diri dan keinginan mereka terkait dengan kehidupan bernegara. Sarekat Dagang Islam yang merupakan media perjuangan ekonomi untuk kalangan pribumi Islam adalah juga sebagai media pembangunan masyarakat Islam pada umumnya. Memang harus diakui bahwa lahirnya organisasi-organisasi Islam ini dipicu atau didorong oleh berbagai macam faktor berbeda. Muhammadiyah, misalnya, lahir lebih dipicu oleh keinginan membentuk Islam yang bersih yang tidak tercampur dengan paham atau budaya non-Islam. Nahdlatul Ulama lahir sebagai respons terhadap maraknya gerakan purifikasi, termasuk yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Oleh karena itu, kelahiran NU adalah upaya memperkuat Islam yang selama ini mereka praktikkan.

Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa kelahiran organisasi-organisasi Islam ini bertujuan untuk memajukan masyarakat Islam

yang berarti juga masyarakat Indonesia. Organisasi-organisasi ini, misalnya, memfokuskan diri dalam membangun umat ini melalui pendidikan. Muhammadiyah membangun pendidikan madrasah, sedangkan NU membangun pendidikan tradisional pesantren. Selain itu, apa yang mereka lakukan sejak awal adalah pembangunan ekonomi umat. Lebih jauh lagi, sudah sejak awal ormas-ormas Islam bergerak dalam kegiatan yang membangunkan atau mengembangkan ekonomi umat. Seperti halnya Sarekat dagang Islam, di lingkungan NU muncul apa yang disebut Nahdlatuttujjar. Gerakan ini, yang artinya gerakan para pedagang, bahkan telah muncul sebelum NU lahir. Hal ini sekadar kekhawatiran para ulama dan tokoh Islam serta perhatian mereka untuk meningkatkan ekonomi umat. Di lingkungan Muhammadiyah telah juga dimunculkan spirit berislam dan berorientasi amal dengan berlandas pada ajaran Al-Qur'an "*Fastabiqul khaerot*" yang artinya berlomba-lombalah dalam kebaikan.

Dengan perhatian terhadap umat atau masyarakat pada umumnya, seperti itu maka tak terhindarkan mereka harus berhadapan dengan penguasa. Artinya, masalah-masalah yang jadi perhatian mereka ini ketika menjadi kebijakan pemerintah dan tidak menguntungkan umat atau bahkan merugikan mereka maka ormas-ormas ini tampil dengan politik maslahatnya atau bagaimana mereka bermanfaat bagi bangsa dan tanah air. Meskipun gerak mereka masih terbatas, gaung politik mereka sangat terdengar. Di masa pemerintahan kolonial, benturan kepentingan dengan penguasa sering terjadi mengingat kolonialisme dengan segala filosofinya adalah untuk menguntungkan para kolonial yang dalam banyak kasus mungkin 'terpaksa', dengan cara mengeksploitasi rakyat. Masih di masa kolonial, Nahdlatul Ulama, misalnya, menolak duduk di *volkraad* atau melarang umat Islam naik haji menggunakan kapal Belanda.

Sebagai bagian dari perjuangan untuk masyarakat, setidaknya masyarakat yang mengikuti ormas-ormas ini, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Persis ikut serta dalam merencanakan pembangunan negara dan bangsa yang bernama Indonesia. Sebagai lanjutan dari perkumpulan ulama dan tokoh Islam yang dibentuk Jepang (ber-

nama Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI), para tokoh ormas Islam terlibat baik dalam merumuskan dasar negara, yang kemudian disebut Pancasila, maupun dalam kegiatan lain, seperti merumuskan landasan dasar bagi kehidupan bernegara dan berbangsa mereka (Fealy, 2003). Dalam kegiatan ini, terlihat bagaimana mereka mendudukkan diri sebagai umat Islam pada satu pihak dan harus kerja sama dengan kelompok nasionalis dan agama lain di pihak lain, dalam membangun Indonesia yang merdeka. Dalam komite atau yang biasa disebut Tim 9 yang merumuskan 'Piagam Jakarta', terdapat beberapa tokoh dari NU dan Muhammadiyah, yang bukan saja mengeluarkan ide dan pikiran mereka berdasar pada kepentingan umat Islam, melainkan juga bernegosiasi dengan kalangan lain. Seperti terlihat dari hasil yang terumuskan dalam 'Piagam Jakarta' bahwa ormas-ormas Islam tersebut memberi sumbangan besar terhadap pembentukan negara baru bernama Indonesia. Mereka, seperti Wahid Hasyim dan Ki Bagus Hadikusumo, masing-masing dari NU dan Muhammadiyah (untuk menyebut sebagai contoh saja) adalah di antara pendiri negara ini (*The Founding Fathers*).

Didorong oleh keharusan berjuang untuk masyarakat atau umat Islam di Indonesia, mereka kemudian juga melanjutkan mendirikan partai politik Islam, sebagai medium perjuangan politik formal dalam negara Indonesia merdeka. Seperti diungkapkan sebelumnya, perjuangan untuk rakyat memang tak bisa tidak akan bersentuhan dengan politik karena hal tersebut banyak berkaitan dengan kebijakan penguasa. Mendirikan partai politik ditujukan untuk dapat bergerak dan bertindak secara sah memperjuangkan kepentingan rakyat. Oleh sebab itu, meskipun mereka kemudian berbeda dalam berpolitik sendiri, apa yang mendorong mereka untuk berpolitik adalah upaya berjuang untuk rakyat atau umat tersebut, dan pada sisi lain umat pun merasa terwakili atau diperjuangkan kepentingan politiknya.

Perjuangan panjang para organisasi sipil Islam ini memperlihatkan bahwa fokusnya adalah memperjuangkan kepentingan umat Islam, yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia. Perlu dicatat bahwa meskipun mereka berjuang untuk umat, politik Islam yang

mereka perjuangkan bukanlah politik yang bertendensi mendirikan Negara Islam dengan kehendak ngotot dan dengan melakukan apapun. Mungkin benar bahwa ide Negara Islam bersarang di kepala para tokoh Islam yang berpolitik saat itu, tetapi sekali lagi bahwa itu tidak dilakukan dengan pemaksaan dan kekerasan. Dapat dilihat bahwa perubahan tujuh kata dalam piagam Jakarta memperlihatkan hidupnya toleransi dan sikap mengalah para tokoh Islam dalam perjuangan politik mereka karena adanya kepentingan persatuan sebagai bangsa. Bayangkan suatu draf yang kemudian menjadi pembukaan dalam undang-undang dasar negara Indonesia berubah beberapa jam sebelum diputuskan oleh sidang saat itu. Tujuh kata dalam draf tersebut, yang sebenarnya agak kurang jelas, diubah karena ancaman dari kalangan Kristen di bagian Indonesia Timur, seperti disuarakan oleh A. A. Maramis. Para tokoh Islam dalam tim yang merumuskan draft tersebut bersedia menerima perubahan tersebut, hanya karena mereka menjaga persatuan sebagai bangsa yang saat itu akan merdeka.

Dalam perjalanan politiknya, ormas-ormas Islam yang ada terlihat lebih akomodatif dan mementingkan persatuan daripada memperjuangkan politik hanya untuk kepentingan umat Islam. Para tokoh Islam yang berada di NU dan Masyumi terlihat tidak memberi dukungan pada upaya Kartosuwirjo dengan Darul Islam-nya di mana dia seolah mau mendirikan negara Islam. Demikian pula ketika terdapat tokoh-tokoh yang terpesona dengan Negara Islam dengan menolak kenyataan politik yang ada, mayoritas para tokoh Islam, baik yang di Partai NU saat itu maupun di Masyumi tidak terpancing untuk ikut membangkang terhadap pemerintah yang sah. Oleh sebab itu, meskipun terdapat tokoh dari Partai Masyumi yang mendukung pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), mayoritas tokoh Islam dan para ulama di Partai NU secara tegas menyarankan agar pemberontakan tersebut ditumpas (Fealy, 2003).

Meskipun demikian, memang harus diakui bahwa sering terdapat perbedaan dalam menafsirkan politik Islam sebagaimana mereka menafsirkan ajaran Islam sendiri, yang menyebabkan mereka berkumpul

dalam organisasi yang berbeda. Perbedaan nyata, misalnya dapat dilihat dalam strategi politik mereka yang berjuang untuk Islam. Partai Masyumi, misalnya, bersikeras tidak bisa berdiri bersama Partai Komunis, yang karenanya menolak sama sekali Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme), sementara partai NU berkemauan berdiri dengan terpaksa bersama Partai Komunis dalam Kabinet Zaken yang dibentuk oleh Sukarno dengan menunjuk Juanda sebagai Perdana Menteri (Fealy, 2003; Anam, 1985). Jika Masyumi sama sekali menolak kehadiran komunis, NU lebih realistis dengan tidak menolaknya karena PKI memang telah hadir dan sebagai fakta, dan tentu saja tidak dapat menolak karena presiden Sukarno memang mengakui keberadaan PKI tersebut, yang kemudian ikut dalam pemilu 1955. Apa yang bisa dilakukan—dalam pikiran para tokoh NU—adalah menjaga dan mengontrol langkah dan politik PKI saat itu yang di akhir tahun 1950 berhasil menarik simpati Sukarno. Dengan ikut dalam kabinet, NU ingin bermain di dalam konteks melawan PKI ini, yang melalui lobi politik bisa lebih berhasil daripada sikap konfrontatif di panggung politik.

Lepas dari keterlibatan organisasi masyarakat sipil ini dalam politik praktis, tujuan utama mereka dalam bergerak ini tetap dipegang. Dalam bidang pendidikan dan ekonomi, tetap saja mereka melakukan kiprahnya sehingga keduanya tetap berkembang. Kegagalannya dalam berpolitik telah membuat mereka, terutama NU, kembali kepada jati dirinya sebagai masyarakat sipil dengan misi membangun masyarakat khususnya masyarakat Islam. Ide Islam sebagai dasar negara, yang mereka perjuangkan, terpaksa harus dibuang karena lawan politik terutama dari kalangan kristiani menolaknya. Penguasa yang phobia terhadap Islam, bahkan kemudian menggiring mereka ke dalam jebakan ekstrem kanan yang tidak bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Penguasa Orde Baru telah mengakhiri petualangan politik sebagian organisasi masyarakat sipil—terutama NU—untuk meninggalkan politik praktis dan kembali menggarap ladang mereka yang terbengkalai. NU sendiri merubah strateginya menjadi politik kenegaraan dan keumatan yang artinya berjuang bukan hanya untuk

umat NU saja, tetapi juga manusia Indonesia secara keseluruhan. Masalah keadilan, kemiskinan, atau bahkan kejujuran berpolitik menjadi lahan yang mereka lihat sebagai medium cara mereka berjuang dan melakukan sikap dan tindakan politik. Tentu saja berpolitik seperti ini adalah dengan tanpa menjadi partai politik karena sudah ditinggalkannya.

Dengan demikian, gerakan organisasi masyarakat sipil ini lebih kencang lagi dalam menggarap lahan mereka. Pendidikan ditingkatkan dan ekonomi umat juga dibangun dan dikembangkan. Muhammadiyah mendirikan ribuan sekolah dan bahkan perguruan tinggi sebagai bagian amal baik yang menjadi misinya. Pada sisi lain, NU mengembangkan pesantren menjadi pesantren modern. Bukan saja sistem pendidikan pesantren diperbaiki dan dikembangkan, melainkan juga mereka mengadopsi pola pendidikan umum atau sekuler, dengan memasukan, baik mata pelajaran umum ke dalam kurikulum sekolah-sekolahnya maupun dengan membangun sekolah-sekolah umum di samping sekolah yang berorientasi pendidikan Islam. Selain itu, meskipun agak terlambat, masyarakat NU juga mendirikan perguruan tinggi di berbagai daerah untuk membangun masyarakat NU yang modern, tetapi tetap religius.

Dalam bidang dakwah dan pengembangannya, kedua organisasi Islam ini juga mendirikan stasiun televisi. Pesan-pesan dakwah dengan begitu bisa disampaikan kepada masyarakat secara lebih luas dan lebih cepat. Meskipun pada dasarnya acara atau program televisi yang mereka sampaikan terkait dengan berbagai bidang, tetapi misi utama mereka adalah menyampaikan pesan Islam agar bisa didengar oleh masyarakat umum. Dengan mendengarkan materi dakwah yang disampaikan para tokoh dan ulamanya, terlihat bahwa mereka tetap berprinsip pada Islam yang moderat dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara yang tidak perlu diganti oleh ideologi lain, termasuk Islam.

C. Faktor Pendorong Gerak Masyarakat Sipil Islam

Hefner (2000; 2019) dalam bahasannya menjelaskan bagaimana peran organisasi sipil Islam berkiprah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perannya dalam mewujudkan kehidupan berdemokrasi begitu jelas karena dengan memegang prinsip-prinsip yang berasal dari ajaran agamanya, masyarakat sipil Islam berinteraksi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk politik yang kelihatannya menonjol dengan memakai nilai-nilai umum yang berdasar dari interpretasi terhadap ajaran agama yang mereka pahami. Dua hal yang bisa terlihat dan dicatat dari sana adalah kiprah mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di mana mereka merupakan bagian dari masyarakat. Kedua adalah prinsip-prinsip dasar mereka yang meskipun berdasar dari agama, tetapi ternyata dapat lentur atau akomodatif terhadap situasi real kehidupan umum yang berdasar pada nilai-nilai umum.

Secara teoritis ditekankan oleh para sarjana bahwa tingkah laku atau pikiran dan pandangan manusia itu digerakkan oleh apa yang disebut norma, yang dipegang oleh individu atau masyarakat. Norma tersebut dapat berupa nilai yang terangkum dalam aturan tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. Norma juga mencakup *world view* di mana masyarakat atau individu bergerak, bertingkah laku, atau melakukan kegiatan kesehariannya. Selain itu, norma juga ada yang tertulis, seperti terkandung dalam kitab suci pemeluk agama. Di kalangan Islam dan masyarakat sipil Islam yang dikaji, norma-norma yang mengarahkan mereka untuk bertindak atau berperilaku dan berkehidupan bersama dalam masyarakat adalah ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, untuk masyarakat sipil Islam, Al-Qur'an adalah pegangan kehidupan mereka dan semua tindakan atau tingkah laku mereka terdorong atau terinspirasi oleh ajaran Al-Qur'an. Seperti sering dikatakan, Al-Qur'an itu mengandung ajaran yang terkait dengan semua aspek kehidupan umat Islam, termasuk politik.

Dengan pemahaman seperti itu, Islam yang mengandung Al-Qur'an tersebut menjadi pegangan hidup, dan dengan petunjuk atau

perintah Al-Qur'an lah umat Islam menjalani kehidupannya. Perlu ditegaskan bahwa apa yang diperintahkan oleh Al-Qur'an tersebut bukan hanya terbatas pada masalah ibadah (penyembahan atau pengabdian kepada yang Maha Pencipta), tetapi juga menyangkut hal-hal kecil, seperti berpakaian atau berdagang. Dalam hal berpakaian, misalnya, ditegaskan bahwa standarnya adalah menutupi aurat. Artinya, seorang Islam harus berpakaian yang pantas, maksudnya secara etika hal tersebut baik dalam perspektif masyarakat pada umumnya. Dalam kerumunan, misalnya, pantas-pantas saja orang berpakaian normal, yakni menutupi badan mulai dari leher sampai kaki. Soal pakaiannya seperti apa adalah soal kebudayaan. Dalam hal ini, tergantung pada masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat Arab memakai gamis, tetapi masyarakat Jawa memakai baju dan celana panjang.

Dengan demikian, Islam itu bagi kalangan masyarakat sipil Islam adalah pandangan hidup atau bahkan cara bagaimana manusia Muslim menjalani kehidupannya. Semua yang dilakukan oleh umat Islam, mulai dari berpakaian sampai pada bagaimana tidur yang baik, merujuk pada ajaran Islam yang terangkum dalam Al-Qur'an dan hadis. Islam dianggap mempunyai konsepsi yang menyeluruh, yakni mencakup berbagai bidang kehidupan, termasuk politik. Pemahaman atau pandangan seperti ini memang wajar dan dapat dimaklumi, mengingat Islam memang mengatur kehidupan umatnya. Meskipun demikian, terkait dengan hal-hal tertentu, para tokoh Islam atau ulamanya berbeda pendapat dan pandangan.

Pada bagian ini, editor akan menguraikan hal-hal penting terkait dengan prinsip-prinsip hidup yang tadi disebutkan, yang benar-benar mendorong atau menggerakkan mereka, baik untuk ikut 'mengatur' kehidupan pada umumnya maupun terkait dengan tujuan dari kehidupan mereka sendiri. Dua hal ini penting, setidaknya dengan ini bisa dipahami mengapa dalam suatu ketika mereka keras dan pada waktu lain mereka dapat akomodatif terhadap kehidupan riil yang mereka jalani. Intinya, dua hal inilah yang menggerakkan mereka untuk melakukan dan menjalani kehidupan bersama, baik sesama

umat Islam maupun dengan umat lain yang mungkin memiliki tujuan hidup yang berbeda.

Dari apa yang dikemukakan, jelaslah bahwa kalangan Islam santri atau taat, yang tergabung dalam berbagai organisasi masyarakat sipil Islam, secara tegas merujuk semua tindakan, sikap, dan pemikirannya pada norma yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis, dua sumber ajaran Islam. Praktik atau implementasi norma ini dalam kehidupan terangkum dalam apa yang disebut ibadah. Konsep ini secara dasar adalah berarti pengabdian, yakni melakukan sesuatu yang diperintahkan agama, terutama apa yang biasa disebut ibadah *mahdhoh*, yakni ibadah murni seperti salat. Namun demikian, makna ibadah ini sebetulnya berlaku untuk segala perbuatan yang secara umum memberikan manfaat bagi orang lain. Untuk melihat bagaimana ibadah itu menjadi praktik rujukan, ada baiknya melihat makna dan tujuan kehidupan sendiri atau untuk apa sebenarnya hidup ini dalam perspektif umat Islam. Prinsip yang melatarbelakangi ini memiliki konsekuensi jauh bagi kehidupan mereka atau bagaimana mereka menjalani kehidupan. Apakah hidup ini untuk mendapatkan kesenangan atau harta yang melimpah? Untuk memahami hal tersebut, kita perlu melihat sumber atau ajaran-ajaran yang menjadi pegangan umat Islam. Konsep makna hidup terdapat dalam Al-Qur'an yang berbunyi "aku tidak jadikan jin dan manusia, kecuali untuk mengabdikan (menyembahku)." Umat Islam mengartikan ayat tersebut dengan istilah ibadah. Beribadah bermakna luas, dan ini tidak hanya terbatas pada apa yang disebut ibadah *mahdah* atau ibadah murni, seperti salat lima waktu, melainkan juga ibadah-ibadah yang masuk dalam wilayah yang dianjurkan, seperti salat sunah sebagai tambahan dari sisi keibadahnya salat wajib atau melakukan amal baik seperti menyantuni fakir miskin.

Ibadah ini bermakna wajib, seperti salat lima waktu atau melaksanakan haji, tetapi ada juga yang bermakna sunah atau dianjurkan. Dengan makna ibadah inilah umat Islam melaksanakan kiprah kehidupannya dalam berbagai bidang. Bila dilihat dari sisi kegiatannya, ibadah itu ada yang masuk dalam bidang ritual, seperti

salat atau juga hal-hal yang rohaniyah, seperti berzikir atau membaca Al-Qur'an. Selain itu, ada yang masuk dalam wilayah kegiatan sosial, seperti memberi makan orang miskin atau anak-anak yatim. Kegiatan-kegiatan sepele, tetapi memberi manfaat untuk orang lain, seperti membersihkan paku di jalan yang dapat menyebabkan orang terluka atau ban mobil kempes, juga termasuk perbuatan ibadah. Bekerja tiap hari untuk menafkahi keluarga juga bernilai ibadah. Oleh karena itu, konsep ibadah inilah yang menggerakkan umat Islam untuk bertindak dan bertingkah laku baik, dalam artian taat menjalankan perintah Al-Qur'an untuk menyembah Allah dan berbaik kepada sesama manusia. Ibadah ini mungkin setara dengan konsep '*calling*' yang disebut Weber (1930) menggerakkan umat Kristiani yang bahkan kemudian melahirkan kapitalisme.

Untuk menunjang pelaksanaan ibadah tadi, umat Islam mempunyai konsep "amar makruf nahi munkar". Konsep ini adalah praksis dari ibadah atau yang menyebabkan ibadah tadi dilaksanakan. Konsep ini artinya "memerintahkan melakukan kebaikan (ibadah) dan melarang melakukan kemungkaran atau kejelekan". Dengan ajaran ini, setiap umat Islam diwajibkan untuk memerintahkan atau menyuruh orang melakukan ibadah. Menyuruh orang melakukan atau melaksanakan salat adalah kewajiban. Selain memerintah untuk melakukan kebaikan, tindakan atau sikap penting lain adalah melarang orang lain melakukan kemungkaran atau kejelekan, maksudnya tindakan jelek. Melarang atau mencegah kejelekan ini juga merupakan kewajiban bagi umat Islam. Mencegah kemungkaran ini bisa berupa melarang orang untuk tidak berjudi, misalnya, sampai pada melarang atau mencegah orang bertindak jelek terhadap orang lain, seperti menyakiti atau menghina.

Oleh karena itu, konsep amar makruf nahi munkar adalah praksis dari ibadah dan penguatan perintah ibadah yang dilakukan oleh umat Islam. Konsep-konsep yang berisi perintah ini biasanya tidak berdiri sendiri, tetapi biasa dikuatkan oleh perintah lain. Mencegah kemungkaran, misalnya telah diperkuat oleh ajaran lain berupa perintah dari Nabi Muhammad. Perintah ini, yakni hadis, menekankan

keharusan mencegah kemungkaran yang bisa terjadi di lingkungan umat Islam. Kemungkaran, lagi-lagi, dapat berupa situasi di mana orang melakukan dosa, seperti perzinaan atau perjudian, bisa juga berupa situasi kezaliman yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Hadis Nabi tersebut menekankan bahwa orang harus mencegah kemungkaran melalui kekuatannya. Seorang penguasa, misalnya, harus mencegah kekejaman yang dilakukan sekelompok orang terhadap kelompok lainnya. Bukan hanya seperti itu, bisa saja seseorang harus melarang perjudian yang terjadi di lingkungan masyarakatnya.

Perintah-perintah agama ini, atau dalam bahasa Weber (1930) disebut '*calling*' memang dipraktikkan oleh umat Islam, setidaknya oleh para tokoh atau ulama yang memimpin umat. Untuk beberapa hal, perintah ini diperkuat dengan perintah atau anjuran lain. Misalnya, hadis secara tegas menyuruh umatnya untuk berdakwah atau menyampaikan apa yang disebut kebenaran. Nabi mengatakan "sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat". Ajaran seperti ini sebetulnya umum saja dan terdapat pada setiap agama besar. Dalam sebuah diskusi pada tahun 2000-an, Romo Magnes secara tegas menyatakan bahwa misionaris adalah bagian dari keharusan umat Kristiani karenanya pembatasan pendirian tempat ibadah, misalnya, bertentangan dengan atau menghadang dakwah mereka. Oleh karena itu, sekali lagi, para organisasi masyarakat sipil Islam bergerak melalui atau digerakkan oleh ajaran yang mereka miliki, yang sebetulnya berkisar pada masalah-masalah etika saja.

Pemahaman terhadap etika antarumat Islam sendiri memang berbeda-beda, selain bagaimana masalah "*calling*" ini diimplementasikan. Di kalangan suni atau ahli sunah *waljamaah* yang merupakan mayoritas umat Islam Indonesia, perspektif penerapan dakwah ini bisa jadi berbeda-beda. Ada kelompok yang keras dan ada yang moderat atau mungkin lemah sikapnya. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa hampir mayoritas umat Islam Indonesia mempraktikkan Islam yang moderat. Oleh karena itu, dakwah lebih mengutamakan kelembutan dan menghindari konfrontasi yang dapat menimbulkan fitnah. Selain itu, tafsiran di antara mereka pun berbeda. Dalam kehidupan

bermasyarakat, misalnya, kalangan ahli sunah pada umumnya selalu mengambil jalan tengah, artinya mereka tidak terlalu condong ke kiri dan juga tidak ke kanan, melainkan tegak di tengah-tengah. Demikian juga halnya dalam berpolitik atau bekerja membangun bangsa, terdapat mereka yang moderat atau akomodatif terhadap pandangan yang berbeda, tetapi terdapat pula yang keras, saklek, dan hitam putih.

D. Dinamika dari Lapangan

Fokus perhatian para pembahas diberikan kepada pembangunan masyarakat sipil Islam dalam kehidupan bernegara dalam sistem demokrasi. Seperti sudah disinggung, fokus diarahkan untuk melihat politik Islam yang berkembang dalam masyarakat atau yang dipraktikkan oleh masyarakat sipil Islam. Politik adalah bidang yang dijalani masyarakat sipil Islam dalam upaya mereka membangun masyarakat Indonesia. Secara formal, masyarakat sipil Islam mendelegasikan politiknya kepada partai-partai Islam yang ada, terutama Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Beberapa partai lain, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang menjadi partai terbuka, masih juga dianggap atau didudukkan sebagai saluran politik Islam mereka. Hal ini artinya, dalam pemilihan umum, partai-partai tersebut menjadi tumpuan harapan mereka, baik dalam menyalurkan aspirasi mereka maupun dalam memperjuangkan kepentingan politik mereka.

Masyarakat sipil Islam, seperti NU dan Muhammadiyah, didirikan dengan tujuan untuk memajukan umat Islam dan mengembangkan Islam itu sendiri. Kajian lapangan, utamanya di tiga daerah, yakni Bandung, Cirebon, dan wilayah Banten, memperlihatkan ada dan hidupnya kegiatan masyarakat sipil, terutama yang diwakili oleh 2 kelompok besar Islam, yaitu NU dan Muhammadiyah. Selain dua organisasi ini, yang memiliki pengikut yang cukup besar, di daerah-daerah yang dikaji ini juga terdapat organisasi masyarakat sipil Islam lain, baik yang mempunyai anggota dan sudah berumur tua, seperti Persis, maupun organisasi Islam baru dan bahkan berkarakter transnasional. Organisasi baru yang paling menonjol adalah Front Pembela

Islam (FPI), yang mengesankan banyak orang sebagai organisasi pembela politik Islam, dan juga HTI (sudah 'almarhum') sebagai organisasi masyarakat sipil Islam yang berkarakter transnasional, mengingat organisasi ini merupakan *Indonesian chapter* dari gerakan Islam internasional.

Di tiga daerah tersebut, dua organisasi Islam besar tadi, yaitu NU dan Muhammadiyah, memang terlihat dominan karena mereka berada di seluruh wilayah. Umat Islam di berbagai wilayah dalam tiga daerah ini adalah penganut atau berafiliasi dengan kedua organisasi masyarakat sipil Islam tersebut. Mengingat keduanya adalah organisasi masyarakat sipil Islam yang sudah lama hidup dan berkiprah ikut membangun negeri Indonesia, aktivitas umat Islam diwarnai oleh mereka ini. Mereka sudah sejak awal berdirinya menggarap bidang pendidikan dan pembangunan ekonomi umat. Oleh karena itu, seperti disebutkan oleh Hefner (2019), masyarakat sipil Islam ini telah ikut membangun negeri, di samping juga dalam kiprahnya selama ini ikut menjadikan Indonesia sebagai negara nasional dengan dasar Pancasila.

Oleh karena itu, dalam konteks demokratisasi, apa yang diperjuangkan oleh masyarakat sipil Islam pada umumnya lebih diarahkan untuk membangun bangsa yang sejahtera dan maju dengan menjunjung pluralisme. Meskipun arah atau niat ini memang bukan baru, mengingat kedua organisasi ini adalah sebagai bagian dari pendiri negara ini seperti diperlihatkan oleh ikut sertanya para tokohnya dalam merencanakan pembentukan negara baru bernama Indonesia pada tahun 1945an, penguatan pemegangan dan pembangunan nasionalisme oleh organisasi sipil Islam perlu diapresiasi. Kekuatan mereka untuk tetap berpegang kepada nasionalisme daripada islamisme, misalnya, adalah memperlihatkan bukan saja karakter kuat mereka dalam berprinsip pluralisme dengan penekanan pada nasionalisme, tetapi pada sisi lain juga memperlihatkan lenturnya mereka atau akomodatifnya mereka dengan perkembangan masyarakat dan condongnya mereka kepada kepentingan bangsa daripada kepada kepentingan umat Islam sebagai kelompok.

Di Cirebon, hampir mayoritas organisasi masyarakat sipil Islam, bahkan FPI yang sering dilabeli sebagai radikal bergerak dalam wilayah politik untuk memperbaiki kehidupan, termasuk menjaga Islam sebagai agama. Secara politik, tidak terdapat perjuangan politik Islam untuk mendirikan Negara Islam. Hal yang sama juga terjadi di Bandung dan Banten pada umumnya, kecuali kelompok-kelompok kecil baru, seperti HTI yang memang tidak bersosialisasi dalam kehidupan masyarakat umum. FPI memang baru berbentuk gerakan dalam artian tidak seperti NU dan Muhammadiyah yang mempunyai lembaga pendidikan dan lainnya, tetapi pergerakan mereka mencakup berbagai hal. Di samping “*amar makruf*” dalam konteks ibadah *mah-dhah*, seperti melarang kemaksiatan, mereka juga bergerak dalam bakti sosial, seperti memberikan bantuan ketika masyarakat terkena bencana. Di Banten, para aktivis FPI membantu masyarakat dalam menanggulangi efek banjir dan turut memberi bantuan kemanusiaan saat terjadi gempa yang melanda daerah ini. Bahkan, setelah nama mereka berganti setelah dibubarkan oleh pemerintah, mereka secara bersama-sama melakukan bakti sosial, misalnya dengan membagikan daging kurban dari uang yang mereka kumpulkan dari para simpatisan dan anggota.

Politik Islam yang dilihat di wilayah ini memang berkembang, tetapi dengan penafsiran yang bervariasi. Faksionalisme yang ada sejak lama ternyata tetap menjadi dasar polarisasi politik. Oleh sebab itu, meskipun beberapa partai, seperti PKB sudah bukan lagi partai Islam, partai ini tetap menjadi pilihan yang mereka coblos dalam pemilu. Hal ini artinya bahwa politik Islam yang diperjuangkan organisasi masyarakat sipil Islam tersebut (jika boleh menyebutnya demikian) adalah bervariasi. Hal ini juga bisa dilihat dari target apa yang ingin dicapai dalam politik Islam tersebut. Sebagian kecil dari mereka mungkin masih menginginkan didirikannya negara dengan karakter Islam, seperti tercetus dalam sikap HTI yang kemudian dibubarkan. Namun, perlu dicatat bahwa kelompok pendukung yang seperti ini sangat kecil. Kelompok di luar HTI, seperti FPI, secara tegas tidak bermaksud mendirikan Negara Islam. Mereka secara khusus

bergerak hanya berpangkal pada keharusan beramal untuk umat dan agama. Oleh karena itu, bisa dipastikan tidak akan ada pihak yang menjawab bahwa tujuan akhir dari politik mereka adalah berdirinya Negara Islam.

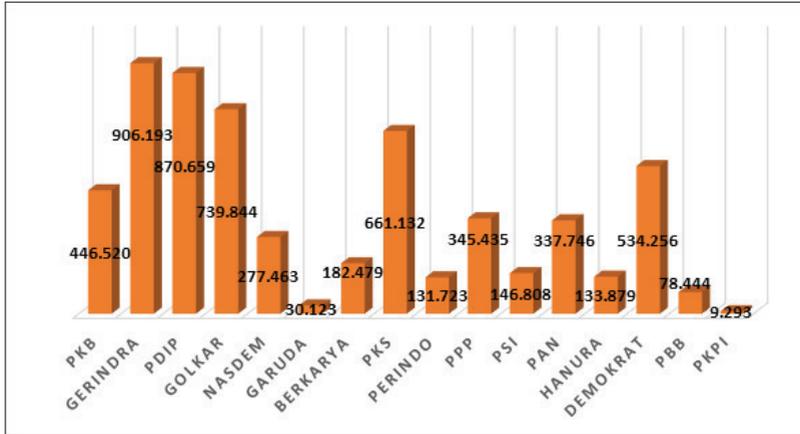
Orientasi politik beraroma aliran masih tetap hidup karena makna politik Islam yang mereka perjuangkan bervariasi. Meskipun demikian, perkembangan politik itu sendiri bukan saja membuat antara berbagai organisasi masyarakat sipil Islam berbeda dalam hal orientasi dan politiknya, tetapi juga menyebabkan terjadinya perubahan dalam beberapa organisasi masyarakat sipil Islam sendiri. Perkembangan politik yang makin akomodatif setelah tidak adanya “ketentuan” atau perintah ulama yang mengharuskan mendukung partai Islam telah menyebabkan anggota masyarakat sipil Islam memberikan dukungan kepada partai-partai yang bahkan berbeda dengan yang dianjurkan oleh pimpinannya. Kasus-kasus yang mengikuti kejadian politik paska pemilihan gubernur Jakarta pada 2016 memperlihatkan bahwa di kalangan NU, sebagai contoh, muncul sikap atau pikiran yang berbeda di antara para anggotanya. Secara formal, dan ini juga sampai di tingkat kota di luar Jakarta, pimpinan NU mengajak anggotanya untuk memberikan dukungan politik kepada pasangan capres Jokowi-Ma’ruf. Arahan ini memang diikuti oleh pimpinan NU sampai di tingkat cabang dan kemudian dipropagandakan pada masa kampanye pilpres. Akan tetapi, hal itu ternyata tidak diikuti oleh semua ulama di level akar rumput NU.

Pola perbedaan seperti ini terjadi juga di daerah-daerah. Apa yang cukup penting terkait mengapa perbedaan ini terjadi adalah karena tidak adanya lagi keharusan yang *legitimate* yang merupakan keputusan bersama. Para anggota NU, misalnya, tidak dibekali oleh keharusan untuk bersikap politik tertentu, mengingat NU telah menjadi organisasi sosial dan tidak berafiliasi secara formal dengan partai politik apapun. Apa yang berbeda dengan NU adalah ormas sipil Islam lain, terutama kalangan modernis, yang kelihatannya masih kuat berjuang dengan label politik Islam. Para pendukung atau pimpinan gerakan 212 didominasi oleh kalangan modern Islam, dan mereka

melembagakan gerakan protes yang dilakukan pada saat menjelang pemilihan gubernur Jakarta dengan membentuk apa yang disebut sebagai “aksi bela Islam”. Lebih jauh dari itu, mereka juga berhasil membangun kegiatan berbasis ekonomi, seperti koperasi, setelah mereka membentuk apa yang disebut sebagai Alumni 212. Mereka juga mendirikan beberapa toko dengan label Mart 212 di beberapa daerah.

Politik yang terbentuk pada masa pemilihan gubernur Jakarta ini, yang diwarnai oleh konflik dengan kalangan nasionalis sekuler, dilanjutkan oleh para pendukungnya dalam pilpres 2019, yaitu dengan tidak memberikan dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf karena pasangan ini dicalonkan oleh PDI Perjuangan, partai sekuler yang sering dianggap tidak bersahabat dengan Islam. Secara sederhana bisa dikatakan bahwa kehidupan politik lokal di tiga kota yang dikaji adalah sama dengan yang terjadi di tingkat nasional. Variasi di kalangan organisasi sipil Islam dengan beragam orientasi politiknya dapat terlihat jelas dan hanya kelompok kecil yang bisa disebut radikal dengan ide Negara Islam. Di Cirebon, pernah terjadi pengeboman di Polres yang menewaskan pelakunya, termasuk Kapolres. Bandung—sebagai kota yang cukup Islami dari sisi penduduknya—juga mengalami kekerasan radikalisme kelompok Islam, yang jauh terjadi di tahun 1980-an awal dengan kasus Cicendo.

Bisa dikatakan bahwa tiga daerah ini cukup kental dengan warna Islam. Oleh karena itu, orientasi Islamis para pendukung organisasi masyarakat sipil Islam juga nyata, meskipun dengan warna yang agak bervariasi. Politik Islam yang diperjuangkan tidaklah lagi dalam arti mendukung partai-partai Islam karena secara formal partai-partai Islam juga sudah berubah. Bisa dilihat bahwa pemilu 2019 di tiga daerah ini didominasi oleh partai sekuler yang memenangkannya. Partai Islam, seperti PKB dan PAN yang keduanya sekarang menjadi partai terbuka dalam arti bukan lagi partai Islam, tidak mendapatkan suara yang signifikan, bahkan di daerah yang Islamnya kuat seperti Serang. Hal ini artinya para pengikut organisasi sipil Islam terpecah



Sumber: Rumah Pintar Pemilu (2019)

Gambar 1.1 Hasil Pemilu 2019 DPRD Provinsi Banten

dalam soal politik dengan memberikan dukungannya kepada beragam partai, termasuk yang sekuler.

Meskipun demikian, polarisasi lama seperti tergambar dalam sistem aliran masih terlihat jelas. Oleh karena itu, meskipun kalangan NU dan Muhammadiyah tidak lagi secara tegas memperjuangkan politik Islam, yakni bukan saja tidak membangun politik untuk kepentingan umat Islam, melainkan juga jauh dari keinginan mendirikan Negara Islam, mereka tetap memberikan dukungan kepada partai politik yang berasal dari kelompok mereka. Kelompok Islam lain, seperti FPI, dimungkinkan juga memberikan dukungan kepada partai yang lahir dari NU karena para tokoh FPI, seperti Rizieq Shihab sendiri, mengklaim penganut ahli sunnah seperti NU. Hanya saja memang perlu ditegaskan bahwa FPI ini, lepas dari pandangan banyak orang yang mengecapnya sebagai radikal, sebenarnya tidak ideologis dalam artian memperjuangkan politik Islam dengan tujuan akhir berdirinya Negara Islam. FPI memang sangat Islamis dalam artian begitu mendalamnya Islam tertanam dalam diri mereka. Namun, seperti bisa dilihat, gerak mereka terbatas pada apa yang mereka

sebut amar makruf nahi mungkar, meskipun mereka lakukan hal itu dengan pola kekerasan.

Dukungan FPI terhadap gerakan “bela Islam 212” juga dipicu oleh sentimen sebagai orang Islam, yang muncul atau menguat karena agama mereka dihina. Dalam hal ini, perlu dipahami bahwa “gerakan 212” bukanlah gerakan ideologis dalam artian ingin mendirikan negara Islam. Gerakan tersebut terbatas pada sentimen mempertahankan Islam dan merespons penghinaan terhadap Islam. Jadi, hadirnya berbagai aktivis FPI daerah dari tiga daerah, yaitu Cirebon, Bandung, dan Banten adalah hanya karena gerakan tersebut berupaya mempertahankan muruah Islam di samping karena dipimpin oleh tokoh FPI sendiri. Sama dengan kelompok lain, termasuk sebagian kalangan NU dan Muhammadiyah, ikut sertanya FPI adalah sebagai bentuk kepedulian besar terhadap Islam pada umumnya.

E. Fundamentalisme Radikal

Jika dilihat dari karakter jati dirinya, berbagai ormas sipil Islam di tiga daerah yang dikaji ini berbeda karena mereka berbeda dalam hal orientasinya. Meskipun sama-sama sebagai organisasi Islam, mereka tidak sama dalam orientasi atau maksud didirikannya sebagai organisasi Islam tersebut. Organisasi-organisasi tua, seperti Muhammadiyah dan NU, mungkin berkarakter Islam yang sama, yakni moderat dengan bersandar pada pluralitas masyarakat sebagai kenyataan dan pembangunan bangsa dengan berlandas pada pluralisme sebagai keharusan. Karakter atau orientasi model ini dari organisasi *mainstream* yang ada, seperti Muhammadiyah dan NU, sudah dibuktikan dalam perjalanan sejarah Indonesia. Moderasi yang menjadi ciri mereka telah dibuktikan oleh kenyataan masih bertahannya mereka hidup dalam masyarakat Indonesia yang plural.

Berbeda dengan ini adalah organisasi baru yang kelahirannya lebih merupakan respons terhadap perkembangan masyarakat Indonesia modern. Ada organisasi yang dibangun untuk menyiasati gerakan misionaris Kristiani yang dianggap agresif melakukan kristenisasi, dan ada pula organisasi yang dibentuk untuk mengawasi lahirnya

gerakan-gerakan baru, yang dari sisi kepercayaan Islam dianggap menyimpang. Lahir dan berkembangnya gerakan Ahmadiyah dan Syiah adalah juga faktor yang memunculkan organisasi-organisasi atau gerakan dimaksud. Di Cirebon, misalnya, terdapat Gerakan Pagar Aqidah (Gardah), sementara di Bandung terdapat gerakan yang sangat anti-Syi'ah dan tidak mentolerir Ahmadiyah. Di Banten, tepatnya Cikeusik, pernah terjadi serangan terhadap anggota Ahmadiyah karena dianggap menyimpang dari yang sudah dijustifikasi oleh organisasi Islam besar seperti NU.

Organisasi sipil Islam yang di dalamnya terdapat FPI sering dilabeli sebagai radikal. Akan tetapi, meskipun terlihat munculnya aksi terorisme, yakni aksi bom bunuh diri di Cirebon dan aksi bom Bali yang pelakunya adalah orang Banten, yaitu Imam Samudra, serta kegiatan intoleransi oleh kelompok Islam di Bandung, hal itu bukan dilakukan oleh aktivis FPI. Radikalisme FPI itu jika kita ingin menyebutnya demikian, terbatas pada gerakan atau kegiatan memberantas kegiatan maksiat yang tentunya bukan saja melanggar norma agama, tetapi juga meresahkan sebagian masyarakat. FPI, yang lahir setelah reformasi, yakni di masa demokratisasi, telah berkembang dan mendapatkan sambutan umat Islam di berbagai daerah. Di ketiga daerah ini FPI tetap hidup dengan nama lain, meskipun ormas ini sudah dilarang. Tetapi kegiatan mereka tetap berjalan dan terbatas pada kegiatan yang bernilai sosial dan masuk dalam amal baik.

FPI adalah organisasi sipil Islam penganut ahli sunah *waljamaah*. Meskipun sedikit berbeda dengan NU, pemahaman mereka terhadap ahli sunah yang menggerakkan keberislaman mereka tidak melampaui batas-batas *sunnisme* dalam berpolitik. Perlu dicatat bahwa mereka ini, seperti sudah disebutkan sebelumnya, lahir dari para pengikut NU dan Muhammadiyah sendiri, atau mungkin pengikut NU *by culture*, bukan formal anggota organisasi. Dalam banyak tingkah polahnya, FPI memang terlihat keras, tetapi lagi-lagi ini adalah sikap mereka yang keras dalam menerapkan ajaran Islam dan mengadopsi norma-normanya yang dipakai dalam menilai situasi sosial di sekeliling mereka. Seperti sering terdengar, alasan mereka melabrak tempat-

tempat maksiat adalah sebagai bagian dari menjalankan perintah agama. Mereka menangani masalah pemberantasan kemaksiatan langsung oleh dirinya sendiri. Hal ini jelas berbeda dengan sikap yang diperlihatkan organisasi besar seperti NU, di mana masalah-masalah sosial yang muncul dalam kehidupan masyarakat plural dan bukan berada dalam Negara Islam, diserahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum.

Sekali lagi, beberapa peneliti menyebut gerakan ini sebagai radikal, yang berusaha menegakkan syari'ah Islam dengan melakukan amal makruf nahi mungkar. Penyebutan radikal memang berkonsekuensi bahwa gerakan, seperti ini akan dituduh sebagai keluar dari Pancasila dan menggantikan dasar negara dengan Islam. Akan tetapi, untuk menetralisasi arti kata radikal ini, saya mengasumsikan bahwa penyebutan radikal dalam hal ini sekedar menyebut bahwa organisasi ini keras. Keras dalam hal ini bila disandingkan dengan kata moderat, yang artinya tidak moderat. Dalam beragama, mereka lebih bersikap dan bertindak tegas.

Perlunya kejelasan dalam penyebutan radikal ini adalah karena organisasi masyarakat sipil, seperti FPI sering disebut sebagai radikal oleh para pengamat, padahal jika melihat pergerakannya sejauh ini, para pimpinan FPI di tiga daerah ini, yaitu Banten, Cirebon, dan Bandung, tidak mempromosikan atau mengajak radikalisme dalam arti memusuhi kelompok agama lain atau bahkan ingin mendirikan Negara Islam. Perlu dikemukakan di sini bahwa gerakan FPI atau juga Forum Umat Islam (FUI) sebenarnya hanya berkeinginan agar syariat Islam dipraktikkan oleh umat Islam. Ajakan ini adalah bagian dari dakwah, sebagai pelaksanaan amar makruf nahi mungkar. Organisasi sipil Islam, seperti FPI tetap menekankan pentingnya NKRI, dengan Pancasila sebagai dasar negara. Apa yang lebih dari FPI adalah bahwa mereka menginginkan masyarakat NKRI ini melakukan dan menjalankan syariat Islam. Mereka menginginkan apa yang oleh ketuanya dikonsepsikan sebagai revolusi akhlak, yakni perbaikan di bidang kehidupan, termasuk mentalitas ke arah yang lebih baik. Jadi, mereka menginginkan perubahan atau perbaikan baik mental maupun spiritual.

F. Menjaga Persatuan

Dalam kontestasi politik dengan kalangan nasionalis sekuler, apa yang disikapi oleh organisasi masyarakat sipil Islam besar, seperti NU adalah menjaga kesatuan sebagai bangsa. Artinya, politik Islam yang dikejar jika mereka melakukannya demikian, adalah politik yang tetap berada dalam bingkai persatuan. Jadi, politik ini adalah upaya membangun masyarakat Islam dengan tanpa diembel-embeli oleh fanatisme Islam atau politik di mana dasar bernegara merujuk pada Islam sebagai ideologi. Strategi ini dilakukan ormas besar, terutama NU, dengan mengakomodir tekanan kekuasaan atau penguasa dengan melepaskan Islam sebagai ideologi yang mendasari perjuangan mereka. Hal ini sebenarnya formalitas belaka yang dengan mudah diikuti oleh mereka, dan NU menyatakannya pada saat kebijakan Asas Tunggal diluncurkan pada 1984.

Sikap dan tindakan seperti itu sebenarnya juga dipunyai atau dilakukan oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil Islam kecil, seperti FPI. Terbukti, misalnya, FPI di tiga daerah yang dikaji mengikuti saja apa yang dianjurkan atau bahkan dilarang oleh pemerintah, termasuk melarang dirinya untuk tampil sebagai organisasi. Meskipun FPI ini bangun kembali dengan nama lain, hal ini bukan berarti perlawanan, melainkan sekedar respons spontan karena pembubaran FPI tersebut dianggap dilakukan dengan semena-mena. Beberapa tokoh FPI memang menyayangkan tindakan pemerintah tersebut karena FPI merasa tidak melakukan sesuatu yang salah atau bahkan menentang pemerintah. Dengan atas nama baru FPI, yaitu Front Persaudaraan Islam seperti di Serang, mereka melakukan bakti sosial dengan membagikan daging kurban yang mereka potong sendiri.

Upaya menjaga persatuan setidaknya telah dinyatakan oleh organisasi masyarakat sipil Islam dengan menerima Pancasila sebagai dasar ideologi organisasi mereka, yang dimulai oleh organisasi besar, seperti NU dan Muhammadiyah. Dengan pengakuan mereka terhadap Pancasila dan deklarasi mereka akan dukungan untuk memakai ideologi ini sejak lama telah berimpak pada perjuangan politik mereka yang harus bebas dari mimpi mendirikan kekuasaan Islam, seperti

pernah terjadi pada tahun 1950-an ketika NU bertindak sebagai partai politik.

Lepas dari akomodatifnya mereka terhadap tuntutan politik yang ada, memang harus diakui bahwa perubahan politik melalui 'reformasi' yang mengikuti jatuhnya Orde Baru bukan saja menyebabkan orientasi lama seperti hidup atau dihidupkan kembali, seperti terlihat dari lahirnya beberapa partai politik berwarna Islam, termasuk juga partai yang didirikan oleh tokoh NU dan Muhammadiyah, tetapi juga politik Islam ini juga didukung oleh hadirnya ormas-ormas Islam baru, seperti Hizbut Tahrir, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan Front Pembela Islam (FPI). Ketiga ormas ini menjadi pendukung politik Islam walaupun dengan kadar yang berbeda. Dengan dibukanya pintu kebebasan melalui demokratisasi, semangat politik Islam, seperti hidup semarak yang menyebabkan di beberapa daerah lahir peraturan daerah yang mengatur aspek tertentu kehidupan masyarakat dengan sumber atau nilai yang berasal dari Islam. Pengaturan yang disebut Perda Syariah ini dituangkan dalam bentuk peraturan dan diloloskan oleh pemerintah di berbagai kabupaten, kota, atau provinsi.

Kehidupan politik Islam atau upaya mengadopsi politik Islam memang masih hidup hanya saja dengan kecondongan yang berbeda. Di Cirebon, Bandung, dan Banten semangat berislam atau mempraktikkan Islam dalam kehidupan sehari-hari memang kuat dilakukan oleh semua organisasi Islam. Hanya saja, politik yang mereka perjuangkan bukan lagi bertendensi menerapkan syariah Islam menjadi rujukan hukum, apalagi memformalkan syariah Islam melalui ketetapan politik, melainkan berjuang untuk kemaslahatan umat Islam khususnya dan manusia Indonesia pada umumnya. Jadi, meskipun banyak atau semua ormas Islam mendukung politik Islam dan ini bagian dari kehidupan mereka dalam negara yang menganut demokrasi, tujuan utamanya adalah memperjuangkan kehidupan umat Islam dan menegakkan syariat untuk dipraktikkan oleh umat. Mereka sama sekali tidak menyebut bertujuan mendirikan Negara Islam, kecuali HTI dan Majelis Mujahidin Indonesia yang kurang populer di banyak daerah karena ketuanya, yakni Abu Bakar Ba'asyir terlibat dalam terorisme.

Mungkin inilah yang oleh seorang cendekiawan disebut sebagai *post-Islamisme* di tengah maraknya masyarakat mempraktikkan Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi, meskipun mereka adalah penganut Islam taat, yang artinya keterikatan mereka dengan Islam begitu kuat, orientasi perjuangan mereka lebih diarahkan pada kepentingan bersama sebagai bangsa, yaitu membangun bangsa.

G. SSistematika Bahasan

Buku ini terdiri dari enam bab. Pada bab I dibahas tentang politik pada masyarakat sipil Islam di Indonesia. Bab ini dimaksudkan sebagai pendahuluan. Dalam bab ini digambarkan wacana akademik terkait dengan Islam dan politik pada umumnya serta bagaimana organisasi masyarakat sipil Islam melaksanakan praktik politiknya. Sebagai pendahuluan, bab ini menganalisis gerak dan dinamika politik yang dialami organisasi masyarakat sipil di Bandung, Cirebon, dan Serang. Ketiganya merupakan daerah santri, maksudnya masyarakatnya cukup kuat mempraktikkan Islam sehingga bahasan pada ketiganya lebih difokuskan pada bagaimana praktik politik kalangan Islam pada umumnya. Secara lebih khusus bab ini menjelaskan tentang beberapa organisasi masyarakat sipil dan orientasi politik mereka. Di sini juga dibahas tentang faktor-faktor yang mendorong gerak politik masyarakat sipil Islam. Apa yang disebut Sipil Islam oleh Hefner dielaborasi sebagai etika yang berasal dari Islam yang kemudian menggerakkan umat Islam baik dalam menjalankan kehidupan pada umumnya maupun menjalankan politik mereka.

Dalam perjalanan politiknya, ormas-ormas Islam yang ada terlihat lebih akomodatif dan mementingkan persatuan daripada memperjuangkan politik yang diarahkan hanya untuk kepentingan umat Islam. Dalam bab ini juga disinggung beberapa kecenderungan yang dilakukan oleh aktivis organisasi masyarakat sipil Islam, baik yang moderat maupun yang radikal. Meskipun demikian, di tiga lokasi ini para aktivis organisasi masyarakat sipil Islam berusaha menjaga persatuan sebagai bangsa karena seperti dirasakan oleh para aktivis

FPI, radikalisme itu bukan saja tidak perlu dilakukan, tetapi juga harus dihapuskan demi menjaga persatuan.

Pada Bab II, Cahyo Pamungkas dan A. Syatori membahas praktik sosial dan politik sejumlah ormas Islam di Cirebon Raya. Dengan memakai perspektif Hefner yang menempatkan sipil Islam sebagai norma etika yang menggerakkan manusia Muslim, kedua penulis mempertanyakan apakah nilai atau norma yang terkandung dalam “sipil Islam” itu memperkuat nilai-nilai demokrasi atau memperlemahnya. Keduanya juga mempertimbangkan pandangan Bruinessen (2013) yang menunjukkan bahwa Indonesia sedang mengalami fenomena *conservative turn*, yaitu pergeseran menuju sikap dan praktik serta orientasi keagamaan yang semakin konservatif (Bruinessen, 2013). Kedua penulis ini menganalisis kasus praktik sosial politik di Cirebon Raya untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang pengaruh “sipil Islam” terhadap Masyarakat dengan kultur politik yang beragam. Menurut kedua penulis ini, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Kuningan merupakan geokultural yang memiliki keunikan dalam tradisi keagamaan mereka. Pada wilayah ini terjadi perjumpaan antara Islam tradisional dan Islam politik. Dalam bab ini diperlihatkan kenyataan bahwa masyarakat sipil Islam di sini mendukung berjalannya politik demokrasi.

Bab III membahas tentang praktik politik Islam di daerah Banten. Sebagai daerah yang dihuni oleh masyarakat Islam taat, penganutan terhadap politik Islam menjadi karakteristik berpolitik masyarakat di sini. Hal ini terjadi karena Islam memang begitu kuat memengaruhi kehidupan masyarakat di sini dan nilai serta norma-normanya menuntun termasuk perjalanan politik mereka. Islam sebagaimana agama lain mengandung etika yang terumuskan dalam norma atau ajaran yang terkandung di dalamnya. Akan tetapi, interpretasi terhadap norma atau ajaran yang ada menyebabkan lahirnya berbagai kelompok politik. Dalam bab ini disinggung tentang bagaimana kelompok Islam yang moderat, seperti NU menjalani politik bernegara mereka. Selain itu, dibahas juga kelompok yang biasa disebut sebagai kelompok Islam garis keras, yakni FPI dan bagaimana perjalanan politik mereka dalam

kancah perubahan peta politik dengan lahirnya partai-partai baru yang sekuler. Apa yang cukup menarik adalah bahwa ternyata partai sekuler lebih unggul dalam mendapatkan dukungan masyarakat Banten daripada partai-partai Islam.

Pada Bab IV didiskusikan tentang orientasi agama dan politik dari masing-masing masyarakat sipil atau organisasi masyarakat sipil Islam di wilayah Bandung. Telaahan difokuskan untuk melihat apakah organisasi masyarakat sipil Islam di Bandung ini cenderung konservatif akomodatif terhadap sifat dan kebijakan negara atau cenderung radikal dalam artian perlu perubahan fundamenatal dalam mengurus negara dan perpolitikan yang berkembang. Pertanyaannya, sejauh mana syariat diposisikan untuk menjadi sumber keputusan politik. Lebih jauh dilihat di sini tentang budaya sipil atau budaya kewarganegaraan organisasi masyarakat sipil dimaksud. Budaya sipil ini adalah *social capital* yang meliputi kepercayaan (*trust*), solidaritas, toleransi, ekuualitas atau kesetaraan, jaringan, asosiasi dan kerja sama yang dilaksanakan atau dipunyai oleh organisasi yang dikaji. Bab ini menyoroti pemahaman dan sikap politik Nahdhtatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), dan Persatuan Umat Islam (PUI).

Bab V dalam buku ini mendeskripsikan berkembangnya masyarakat sipil Islam di Kota Bandung. Tercatat dalam sejarah, di Kota Bandung pernah berkembang organisasi massa Islam radikal, yaitu Darul Islam/Tentara Islam Indonesia buatan SM Kartosuwiryo. Bandung memang bukan satu-satunya kota di mana Darul Islam berkembang. Akan tetapi, sebagai kota besar apakah keberadaan organisasi Islam radikal ini membuat Kota Bandung kemudian berkembang menjadi kota yang penduduknya religius konservatif, atau Bandung seperti kota besar lainnya adalah kota sekuler di mana religiositas masyarakatnya berkembang biasa saja. Menurut Luthfi, penulis bab ini, masyarakat Bandung menghadapi tantangan cukup besar terkait dengan hubungan di antara berbagai organisasi Islam yang berbeda. Di kota ini, terdapat organisasi massa Islam yang radikal konservatif di samping juga yang liberal moderat, yang

masing-masing tumbuh di tengah hiruk pikuknya Kota Bandung. Kebudayaan atau tradisi Sunda tentu saja ikut berpengaruh atau ikut menyaring terhadap semua perkembangan berislam nya masyarakat, mengingat kebudayaan Sunda ini adalah jati diri masyarakat Bandung.

Pada bab terakhir buku ini dibahas mengenai dinamika politik Islam di Kota Cirebon. Menurut Usman Manor yang membahas bab ini, politik dan agama merupakan dua hal yang mewarnai perkembangan masyarakat Kota Cirebon. Hal ini terjadi karena politik Islam di Kota Cirebon telah dianut sejak lama mengingat di masa lalu wilayah ini diatur oleh sistem kerajaan bercorak Islam. Meskipun demikian, posisi Cirebon sebagai kota dagang telah memungkinkan kota ini dihuni oleh beragam manusia yang berbeda agama yang bahkan berasal dari luar Nusantara. Karena karakternya yang heterogen, masyarakat sipil Islam yang berkembang di sana bersifat toleran dan humanis yang hidup dalam suatu *Caruban* (campuran) yang menjadi asal kata Cirebon. Karakter ini adalah hasil penyerapan terhadap etika atau norma Islam yang ditanamkan oleh kerajaan. Dengan karakter seperti itu, masyarakat Islam Cirebon dapat mudah hidup dan berpartisipasi dalam demokrasi yang diberlakukan di Cirebon modern sekarang.

H. Penutup

Berbagai organisasi masyarakat sipil Islam telah berkembang dan ikut andil dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Dapat dilihat bahwa organisasi ini berkembang dan dari sisi jumlah bertambah banyak terutama setelah reformasi politik dilakukan di Indonesia, menyusul jatuhnya Orde Baru. Hadirnya organisasi masyarakat sipil Islam besar masih terasa dominan dan merekalah yang seolah merepresentasikan masyarakat sipil Islam. Mereka dominan karena sudah *settled* dan terlibat secara langsung dalam kehidupan politik sejak lama sehingga seolah menjadi wakil masyarakat sipil Islam tadi.

Sesuai dengan karakternya sebagai organisasi Islam, mereka sejak awal berjuang atau memperjuangkan apa yang disebut politik Islam. Secara sederhana bisa dikatakan bahwa perjuangan ini dimaksudkan untuk kepentingan umat Islam, meskipun dalam beberapa hal bisa

menjadi sangat partikular untuk kelompok tertentu, yakni kelompok mereka yang menganut ideologi tertentu. Akan tetapi, persaingan atau bahkan benturan dengan kalangan sekuler yang dipimpin oleh penguasa telah menyebabkan mereka secara politik berubah. Politik Islam bukan lagi menjadi tujuan atau media perjuangan mereka karena dalam hal ini perjuangan politik mereka lebih diarahkan untuk membangun bangsa dan mempertahankan pluralisme atau kebinekaan bangsa ini.

Meskipun umat Islam berkembang makin religius dalam arti komitmen keberislaman mereka menguat dengan cara mengaplikasikan norma Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka, politik Islam tidaklah menjadi tujuan mereka. Harus diakui bahwa situasi penguatan keagamaan ini berpengaruh pada sebagian organisasi masyarakat sipil Islam untuk kembali kepada prinsip memperjuangkan politik Islam. Meskipun demikian, momen demokratisasi yang membuka kebebasan ini hanya sekadar berpengaruh atau menyentuh kesadaran Islam mereka untuk jangka waktu singkat. Bisa dilihat begitu demokratisasi dilakukan, menyusul jatuhnya Orde Baru, banyak partai Islam didirikan, termasuk oleh para tokoh organisasi Islam besar. Hanya saja, meskipun berlabel Islam, mereka dalam perkembangannya mengarahkan politik mereka untuk memperjuangkan kepentingan bangsa secara keseluruhan. Oleh karena itu, semangat berislam yang mereka tunjukkan tidak serta merta sebagai pertanda keinginan mereka memperkuat politik Islam. Dalam kehidupan organisasi masyarakat sipil Islam itu sepertinya sudah tidak ada keinginan untuk menjadikan Islam sebagai dasar Negara. Semangat mereka, termasuk kerasnya semangat yang diperlihatkan oleh ormas, seperti FPI hanya dimaksudkan untuk menerapkan nilai-nilai Islam untuk perbaikan bangsa Indonesia karena nilai-nilai Islam tersebut secara umum tidak bertentangan dengan kehidupan masyarakat sekuler. Memang harus diakui ada dua organisasi masyarakat sipil Islam, yaitu HTI dan MMI, yang secara tegas berjuang untuk mendirikan khilafah. Namun seperti terbukti, ide ini tidak diterima masyarakat Islam sendiri, dan HTI dibubarkan pemerintah.

Dengan demikian, perkembangan organisasi masyarakat sipil Islam ini cukup positif untuk kemajuan bangsa Indonesia. Demokratisasi telah memberi ruang pergerakan untuk siapa saja sebagai media perjuangan mereka. Perkembangan masyarakat sipil Islam yang sehat tentu saja akan memperkuat demokrasi itu sendiri karena mereka adalah aset bangsa yang akan ikut berperan dalam politik demokrasi yang dibangun bersama. Catatan penting yang perlu diingat adalah bahwa perkembangan organisasi masyarakat sipil ini tidak mudah dan mereka selalu terhambat dengan tidak dimilikinya pendanaan yang memadai.

Daftar Referensi

- Adeney-Risakotta, B. (2018). *Living in a Sacred Cosmos: Indonesia and the future of Islam*. Yale University Southeast Asia Studies.
- Almond, G. A. (1988). The return to the state. *American Political Science Review*, 82(3), 853–874. <https://doi.org/10.2307/1962495>
- Anam, C. (1985). *Pertumbuhan dan perkembangan NU*. Jatayu.
- Bayat, A. (2013). *Post-Islamism: The many faces of political Islam*. Oxford University Press.
- Berger, P. L. (Ed.). (1999). *The desecularization of the world: Resurgent religion and world politics*. The ethics and public policy center.
- Bourchier, D. M. (2019). Two decades of ideological contestation in Indonesia: From democratic cosmopolitanism to religious nationalism. *Journal of Contemporary Asia*, 49(5), 713–733. <https://doi.org/10.1080/00472336.2019.1590620>
- Bruinessen, M. (Ed.). (2013). *Contemporary developments in Indonesian Islam: Explaining the “conservative turn”*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Crouch, H. (1980). The New Order: The prospect for political stability in Indonesia. In J.J Fox (eds), *Indonesia: Australian perspective*. Research School of Pacific Studies.
- Elson, R. E. (2009). Another look at the Jakarta charter controversy of 1945. *Indonesia*, 88, 105–130. <http://www.jstor.org/stable/40376487>
- Fealy, G. (2003). *Ijtihad politik ulama: Sejarah NU 1952–1967*. LKIS.
- Fealy, G. (2020). Jokowi’s Repressive Pluralism. *East Asia Forum* (27 September)

- Feith, H., & Castle, L. (Ed.). (1970). *Indonesian political thinking, 1945–1965*. Cornell University Press.
- Fogg, K. W. (2012). *The fate of Muslim nationalism in independent Indonesia*. [Disertasi tidak diterbitkan]. Yale University.
- Geertz, C. (1965). *The social history of an Indonesian town*. The MIT Press.
- Habermas, J. (1961). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois Society*. MIT Press.
- Habermas, J. (2008, June 18). Notes on a post-secular society: Both religious and secular mentalities must be open to a complementary learning process if we are to balance shared citizenship and cultural difference. *Signandsight.com*. <http://www.signandsight.com/features/1714.html>.
- Hefner, R. W. (2000). *Civil Islam: Muslims and democratization in Indonesia*. Princeton University Press.
- Hefner, R. W. (2019). Whatever happened to civil Islam? Islam and emocratization in Indonesia, 20 years on. *Asian Studies Review*, 43(3), 375–396. <https://doi.org/10.1080/10357823.2019.1625865>
- Ismail, F. (1995). *Islam, politics and ideology in Indonesia: A study of the process of Muslim acceptance of Pancasila*. [Disertasi, McGill University]. eScholarship@McGill. <https://escholarship.mcgill.ca/concern/theses/2801ph921>
- Liddle, W., & Muzani. (2013). From transition to consolidation. Dalam Künkler, Mirjam, & Alfred Stepan, (eds). *Democracy and Islam in Indonesia*. Columbia University Press.
- Rumah Pintar Pemilu. (2019, 13 Mei). *Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Banten Pemilu tahun 2019*. <https://rpp-kpubanten.id/suara/dprd>
- Robertson, R., & Chirico, J. (1985). Humanity, globalization, and worldwide religious resurgence: A theoretical exploration. *Sociological Analysis*, 46(3), 219–242. <https://doi.org/10.2307/3710691>
- Turmudi, E. (2016). Islamic politics in contemporary Indonesia. *International Journal of Political Studies*, 2(3), 1–9.
- Turmudi, E. (2018). Religion in current Indonesian politics: puritan Islam vis-à-vis secular nationalist. *Humanities and Social Sciences Review*, 08(02): 639–650
- Tocqueville, A. (1956). *Democracy in America (1835)*: Vintage Books.
- Weber, M. (1930). *The Protestant ethic and the spirit of capitalism* (Talcott Parsons Penerj.). George Allen and Unwin.